

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Indonesia ditantang untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi secara baik dan berkelanjutan, sehingga dapat mengurangi ketertinggalan dari negara maju (Mardani, 2021). Pertumbuhan perekonomian suatu negara tidak terlepas dari peran usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang memiliki peranan penting dan krusial. Adapun tujuan UMKM menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah adalah untuk menumbuhkan dan mengembangkan usaha dalam rangka membangun perekonomian nasional berdasarkan demokrasi ekonomi yang berkeadilan. Peranan dan kontribusi UMKM terhadap perekonomian Indonesia dapat dirasakan diberbagai daerah, hal ini dikarenakan pasar UMKM telah menjangkau pasar internasional atau luar negeri (Akhiar, 2021). Sehingga, UMKM dapat menciptakan adanya kestabilan perekonomian, pengentasan kemiskinan, serta penyumbang devisa bagi negara.

Data yang diperoleh Kementerian Koperasi dan UMKM menyatakan saat ini jumlah UMKM mencapai 64,2 juta dan kontribusi UMKM terhadap perekonomian Indonesia meliputi kemampuan yang menyerap 97% dari total tenaga kerja yang ada serta dapat menghimpun sampai 60,4%. Namun meningkatnya jumlah UMKM di Indonesia juga tidak terlepas dari tantangan yang ada. Perkembangan UMKM yang cukup pesat menampakan adanya potensi yang

besar atas kekuatan domestik. Jika dikendalikan dan dikembangkan dengan benar hal ini akan menjadi kekuatan ekonomi yang tangguh. Berdasarkan data dari Dinas perdagangan, perindustrian dan Koperasi, UMKM Kabupaten Buleleng, berikut merupakan perkembangan jumlah UMKM berdasarkan klasifikasi usaha di Kabupaten Buleleng pada Tabel 1.1

Tabel 1.1  
Perkembangan Jumlah UMKM Berdasarkan Klasifikasi Usaha di Kabupaten Buleleng Tahun 2020-2021

No	Jenis Usaha	Tahun					
		2020			2021		
		Formal	Non Formal	Jumlah	Formal	Non Formal	Jumlah
1	Usaha Mikro	5.709	38.961	44.670	7.007	40.304	47.311
2	Usaha Kecil	3.655	5.921	9.576	3.662	5.992	9.654
3	Usaha Menengah	217	9	226	225	9	234
Jumlah		54.472			57.199		

Tabel 1.1 menunjukkan bahwa UMKM mengalami peningkatan jumlah dari tahun 2020-2021 yang dimana meningkat sebesar 2.727 unit. Hal ini menggambarkan bahwa perkembangan UMKM pertahun meningkat. Jumlah tersebut terdiri dari tiga klasifikasi yakni usaha mikro, kecil dan menengah yang terdiri atas bidang perdagangan, bidang jasa, bidang agribisnis serta *non* agribisnis. Adapun data mengenai perkembangan jumlah UMKM di Kabupaten Buleleng dari masing kecamatan periode 2018-2021.

Tabel 1.2  
Perkembangan Jumlah UMKM Per Kecamatan di Kabupaten Buleleng Tahun 2018-2021

No	Kecamatan	Tahun			
		2018	2019	2020	2021
1	Kec. Buleleng	6.600	6.798	9.358	9.779

No	Kecamatan	Tahun			
		2018	2019	2020	2021
2	Kec. Gerokgak	4.619	4.794	8.055	8.635
3	Kec. Tejakula	3.132	3.265	6.119	6.617
4	Kec. Sawan	3.128	3.211	5.553	5.747
5	Kec. Sukasada	2.941	3.047	5.034	5.294
6	Kec. Busungbiu	3.687	3.757	5.608	5.873
7	Kec. Seririt	4.190	4.265	5.785	5.945
8	Kec. Banjar	3.490	3.588	4.976	5.170
9	Kec. Kubutambahan	2.765	2.830	4.001	4.156
Jumlah		34.535	35.538	54.472	57.199

Berdasarkan tabel 1.2 jumlah pertumbuhan UMKM yang paling banyak berada di Kecamatan Buleleng. Kecamatan Buleleng menempati posisi pertama dengan jumlah populasi sebanyak 9.779 unit UMKM. Banyaknya jumlah UMKM tentunya banyak pula permasalahan yang terjadi, sehingga UMKM di Kecamatan Buleleng memiliki potensi tantangan yang lebih besar dari 9 Kecamatan di Kabupaten Buleleng. UMKM mengalami kesulitan dalam peningkatan diduga diakibatkan karena permasalahan kurangnya pemahaman mengenai keuangan. Banyak pelaku UMKM tidak melakukan pengelolaan keuangannya dengan baik bahkan tidak mengetahui kondisi keuangan usahanya sendiri, tidak memiliki tujuan keuangan jangka panjang, serta tidak melakukan pemisahan antara keuangan pribadi dan keuangan usahanya. Hal ini disebabkan karena pengetahuan UMKM yang masih tergolong rendah.

Lambatnya perkembangan UMKM untuk terjadinya peningkatan juga disebabkan karena tidak menggunakan produk jasa keuangan secara maksimal. UMKM mengalami kesulitan dalam mengakses produk jasa keuangan karena tingginya persyaratan dari bank sehingga terkadang sulit dipenuhi, instansi keuangan yang terlalu selektif dalam memilih nasabah, dan pandangan terhadap nasabah golongan rendah yang dianggap tidak menguntungkan (Sanistasya,

2019). Tidak hanya itu, terjadinya kendala administrasi juga menyebabkan kesulitan pada akses pembiayaan. Kemudahan akses pembiayaan tersebut akan memberikan dorongan untuk tumbuh dan berkembang UMKM. Hasil survei dari beberapa jenis UMKM, industri kerajinan mengalami perkembangan yang paling baik. Hal ini dikarenakan pemerintah lebih mengutamakan industri kerajinan untuk mendapat prioritas pengembangan yang dinilai mempunyai daya kuat dalam mendorong pertumbuhan ekonomi. Berdasarkan pernyataan tersebut menunjukkan bahwa untuk mengembangkan UMKM, maka perlu adanya pembinaan untuk mendukung kinerja UMKM.

Pertumbuhan UMKM mengakibatkan segala kegiatan maupun aktivitas usaha dengan berbagai bidang UMKM berkembang lebih banyak sehingga dibutuhkan tingkat kinerja UMKM yang lebih baik. Kinerja merupakan hasil pekerjaan yang mempunyai hubungan erat dengan tujuan strategis organisasi, kepuasan pada konsumen dan memberikan kontribusi pada ekonomi (Wulandari, 2019). Semua jenis usaha terutama UMKM, tentunya memiliki tujuan agar usahanya memiliki kinerja terbaik untuk mewujudkan perkembangan UMKM dengan kinerja yang baik pada seluruh sektor yang ada seperti sektor keuangan, produksi, distribusi dan pemasaran (Septiani dan Wuryani, 2020). Suatu ukuran dibutuhkan dalam mengukur kinerja usaha seperti tingkat pencapaian dan kesuksesan dari sebuah usaha. Kinerja UMKM dipengaruhi oleh dua faktor yaitu faktor internal dan eksternal (Fibriyani dan Mufidah, 2018). Faktor eksternal yaitu seperti suasana lingkungan kerja, kebijakan pemerintah dan lain sebagainya. Adapun faktor internal yaitu seperti kapabilitas pada diri manusia dan kualitas sumber daya manusia.

Pengetahuan yang baik mengenai keuangan dari pelaku UMKM akan mendorong kemampuan dalam mengatasi keuangan pelaku UMKM sehingga dapat terkendalikan. Salah satu faktor yang dapat meningkatkan kinerja UMKM yaitu literasi keuangan. Literasi keuangan adalah pengetahuan, keterampilan dan keyakinan, yang memengaruhi sikap dan perilaku untuk meningkatkan kualitas pengambilan keputusan dan pengelolaan keuangan dalam rangka mencapai kesejahteraan (Soetiono dan Setiawan, 2018). Literasi keuangan sangat penting bagi pelaku UMKM karena literasi keuangan memperolehkan UMKM mengenai sumber-sumber pendanaan dan keterampilan yang akan membekali UMKM untuk mengoptimalkan struktur keuangannya (Akhiar, 2021). Ketika pelaku UMKM menggunakan literasi keuangan dengan baik maka akan memberikan dampak yang baik dalam meningkatkan kinerja UMKM. Hal ini dinyatakan oleh Indriyati (2020) yang menyebutkan bahwa literasi keuangan berpengaruh positif terhadap kinerja UMKM.

Pelaku UMKM masih banyak mengalami kendala dalam perkembangannya dan mempertahankan usahanya, salah satu faktor penyebabnya yaitu akses permodalan yang masih terbatas. Inklusi keuangan adalah seluruh upaya yang bertujuan untuk meniadakan segala bentuk hambatan terhadap akses masyarakat dalam memanfaatkan layanan jasa keuangan dengan biaya yang terjangkau (Soetino dan Setiawan, 2018). Akses terhadap layanan keuangan menjadi bagian yang penting untuk pertumbuhan ekonomi. Pelayanan keuangan yang mudah diakses dapat menarik minat pelaku UMKM dalam melakukan akses keuangan seperti meminjam dan menabung. Kemudahan akses keuangan diharapkan dapat

membangun aset dan membantu kegiatan UMKM. Menurut Yanti (2019) inklusi keuangan memiliki pengaruh positif terhadap kinerja UMKM.

Literasi keuangan dan inklusi keuangan memiliki interelasi yang erat dalam pemberdayaan konsumen. Interelasi ini memiliki kaitan yang berbanding lurus dengan peningkatan kemampuan dan pemahaman seseorang dalam menentukan layanan jasa atau produk keuangan. Beberapa penelitian mengenai hubungan akses keuangan dan manajemen keuangan telah diidentifikasi sebagai penyebab yang paling penting dalam menentukan tumbuh atau meningkatnya UMKM (Amalinda, 2019). Dengan meningkatnya jumlah UMKM, maka perlu adanya pembinaan untuk mendukung kinerja UMKM dengan memberikan pemahaman tentang literasi keuangan dan inklusi keuangan.

Menurut penelitian terdahulu, yang dilakukan Dermawan (2019) yang menemukan bahwa inklusi keuangan tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja dan keberlangsungan UMKM. Hal ini sesuai dengan penelitian Hilmawati & Kusumaningtias (2021) menyatakan, inklusi keuangan juga tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja dan keberlangsungan sektor UMKM. Pernyataan ini berbanding terbalik dengan hasil penelitian Wulandari (2019) yang menyatakan bahwa literasi keuangan dan inklusi keuangan berpengaruh signifikan terhadap kinerja UMKM. Penelitian ini sesuai dengan Septiani dan Wuryani (2019) yang menyatakan bahwa literasi keuangan dan inklusi keuangan juga berpengaruh signifikan terhadap kinerja UMKM.

Berdasarkan latar belakang diatas, terjadi perbedaan pada hasil penelitian sebelumnya yang dimana milik Dermawan (2019), Hilmawati dan Kusumaningtias (2021) menunjukkan bahwa masih terdapat inkosistensi terhadap

variabel Inklusi Keuangan sehingga perlu diteliti lebih lanjut. Kemudian perbedaan yang lain yaitu pada lokasi, penentuan populasi dan sampel yang berbeda dengan riset sebelumnya, dimana pada riset ini peneliti memilih lokasi riset di Kecamatan Buleleng. Berangkat dari fenomena dan uraian yang telah dipaparkan sebelumnya, peneliti memutuskan untuk melakukan penelitian dengan mengangkat judul, **“Pengaruh Literasi Keuangan dan Inklusi Keuangan Terhadap Kinerja UMKM di Kecamatan Buleleng”**.

### **1.2 Identifikasi Masalah**

Berdasarkan hasil penjabaran latar belakang penelitian diatas, maka dapat diidentifikasi masalah sebagai berikut:

- (1) UMKM mengalami kesulitan dalam peningkatan karena kurangnya pemahaman mengenai keuangan sehingga tidak melakukan pengelolaan .keuanganya dengan baik.
- (2) Pelaku UMKM tidak mengetahui kondisi keuangan usahanya sendiri dan tidak memiliki tujuan keuangan jangka panjang serta tidak melakukan pemisahan antara keuangan pribadi dan keuangan usahanya.
- (3) Lambatnya perkembangan UMKM untuk terjadinya peningkatan disebabkan karena tidak menggunakan produk jasa keuangan secara maksimal.
- (4) Pelaku UMKM mengalami kesulitan dalam mengakses produk jasa keuangan karena tingginya persyaratan dari bank sehingga terkadang sulit dipenuhi.
- (5) UMKM mengalami kendala administasi sehingga menyebabkan kesulitan pada akses pembiayaan.

### 1.3 Pembatasan Masalah

Berdasarkan identifikasi permasalahan diatas, maka masalah yang dibatasi yaitu penelitian ini hanya memfokuskan pada pengaruh literasi keuangan dan inklusi keuangan terhadap kinerja UMKM.

### 1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan hasil penjabaran latar belakang penelitian, maka rumusan masalah penelitian ini adalah sebagai berikut:

- (1) Bagaimana pengaruh literasi keuangan dan inklusi keuangan terhadap kinerja UMKM di Kecamatan Buleleng?
- (2) Bagaimana pengaruh literasi keuangan terhadap kinerja UMKM di Kecamatan Buleleng?
- (3) Bagaimana pengaruh inklusi keuangan terhadap kinerja UMKM di Kecamatan Buleleng?

### 1.5 Tujuan Penelitian

Dari rumusan masalah yang telah dipaparkan di atas adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui:

- (1) Pengaruh literasi keuangan dan inklusi keuangan terhadap Kinerja UMKM di Kecamatan Buleleng.
- (2) Pengaruh literasi keuangan terhadap kinerja UMKM di Kecamatan Buleleng.
- (3) Pengaruh inklusi keuangan terhadap kinerja UMKM di Kecamatan Buleleng.



## 1.6 Manfaat Hasil Penelitian

### (1) Manfaat Teoretis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan referensi untuk penelitian berikutnya dan memberikan sumbangan konseptual bagi peneliti sejenis dalam rangka meningkatkan pengetahuan untuk kemajuan di dalam dunia Pendidikan.

### (2) Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan menjadi tambahan wawasan bagi para pelaku UMKM mengenai pentingnya literasi keuangan dan inklusi keuangan serta bagaimana cara pengelolaan keuangan usaha yang baik dan benar.

